



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 578 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 245 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 yang mendukung pelaksanaan sasaran Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, maka telah ditetapkan Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nama dan pagu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan surat Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 120/459/DP3AP2KB/2025 Hal: Usulan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2025 Tanggal 2 Mei 2025, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 20);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 981);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 nomor 1038);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 245 Tahun 2025 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama kegiatan sehingga Daftar Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 menjadi sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau selaku pelaksana Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Mei 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
 Nomor : 578 Tahun 2025
 Tanggal : 6 Mei 2025

**DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI
 KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA		
SUB KEGIATAN PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA		
1	Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan LANUDAL Tanjungpinang	Tanjungpinang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
2	Pembangunan Rumah Sakit Angkatan Darat Desa Bengkong Kota Batam (Lanjutan)	Batam
3	Pembangunan Gedung Dirkrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kota Batam (Lanjutan)	Batam
4	Pembangunan Gedung Persatuan Istri Tentara (Persit) di KOREM 033 WIRA PRATAMA, Tanjungpinang	Tanjungpinang
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI		
5	Rehabilitasi Kantor BLK Km. 8, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
6	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		
SUB KEGIATAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN CAGAR BUDAYA, KAWASAN PARIWISATA, KAWASAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DAN KAWASAN STRATEGIS LAINNYA		
7	Penataan Kawasan Taman Gurindam 12 (Lanjutan)	Tanjungpinang
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI		

SUB KEGIATAN REHABILITASI JEMBATAN		
8	Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN		
9	Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Batu 14 - Pelabuhan Tanjung Berlian Kabupaten Karimun (DBH Sawit Provinsi Kepulauan Riau Lanjutan)	Karimun
SUB KEGIATAN REKONSTRUKSI JALAN		
10	Peningkatan Jalan Coastal Area, Kabupaten Karimun	Karimun
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN		
11	Pembangunan Jembatan Semala, Kabupaten Natuna	Natuna
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN		
12	Pembangunan Jalan Akses Menuju Makogabwilhan Pulau Dompak (Lanjutan)	Tanjungpinang

II. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS BESERTA PSU BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI		
1	Pembangunan Rumah Khusus Bagi Korban Bencana di Kecamatan Serasan	Natuna
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha		
SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha		
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam	Batam
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Bintan	Bintan
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Karimun	Karimun
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kota Tanjungpinang	Tanjungpinang
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Kumuh Kabupaten Lingga	Lingga
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) Ha SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha		

7	Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Temoyong, Batam	Batam
8	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Individual di Pemping	Batam
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN		
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN		
9	Semenisasi Jalan Masuk menuju SMKN 9 Batam	Batam
10	Pembangunan TPQ Yayasan Al-Hidayah Perumahan PGRI Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam	Batam
11	Penataan PSU Fasilitas Umum Kapling Tiban Madani, Tiban 1 RW 04 Kelurahan Patam Lestari, Sekupang	Batam
12	Penataan PSU Fasilitas Umum Perumahan Tiban Palem RW 08 Kelurahan Tiban Baru, Sekupang	Batam

III. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU		
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Rempang Galang	Batam
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK		
2	Seragam Siswa SMA	Provinsi Kepulauan Riau
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		
3	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 25 Batam	Batam
4	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 26 Batam	Batam
5	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMAN 29 Batam	Batam
KEGIATAN PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN		
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK		
6	Seragam Siswa SMK	Provinsi Kepulauan Riau
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA PESERTA DIDIK		
7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Provinsi Kepulauan Riau
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU		

8	Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 10 BATAM	Batam
9	Pembangunan Ruang Kelas Baru di SMKN 11 BATAM	Batam
KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU		
10	Lanjutan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 2 Batam	Batam

IV. DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA		
1	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier III Tingkat Provinsi Kepulauan Riau	Tanjungpinang
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		
2	Pengadaan Alat Kesehatan (Ventilator) untuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri	Batam

V. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		
KEGIATAN PENGELOLAAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN BERUPA SINAR MATAHARI, ANGIN, ALIRAN DAN TERJUNAN AIR, GERAKAN DAN PERBEDAAN SUHU LAPISAN LAUT DALAM WILAYAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN ANEKA EBT		
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Tenaga Surya	Batam Karimun Tanjungpinang
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
KEGIATAN PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PERDESAAN		
SUB KEGIATAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU		
2	Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL)	Batam

VI. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL		
1	Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelabuhan Jagoh	Lingga
2	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Permai Kampung Beko Pulau Kasu	Batam

VII. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI		
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP		
1	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil	Provinsi Kepulauan Riau
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP		
2	Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap kepada Nelayan Kecil	Provinsi Kepulauan Riau
KEGIATAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI		
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN		
3	Pembangunan Tambatan Perahu untuk nelayan di Kabupaten Karimun	Karimun
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT		
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT		
4	Bantuan Jaring Keramba untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	Bintan
SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT		
5	Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan untuk Pembudidayaan Ikan di Laut	Provinsi Kepulauan Riau

VIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA		
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN PROVINSI		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Rumah Perlindungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Tanjungpinang
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK KEWENANGAN PROVINSI		
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak)	Tanjungpinang

IX. RSUD RAJA AHMAD TABIB PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM dan UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		
1	<i>Bronchoscopy</i>	Tanjungpinang
2	<i>Treadmill</i>	Tanjungpinang

X. RSJKO ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA PAKET PEKERJAAN/URAIAN SUB RINCIAN OBJEK	LOKASI
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
KEGIATAN PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI		
SUB KEGIATAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		
1	<i>Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)</i>	Bintan
2	<i>Qualitatif EEG</i>	Bintan
3	<i>Bioneurofeedback</i>	Bintan
4	<i>Bed Electrical Hospital</i>	Bintan
5	<i>Bed Manual Hospital</i>	Bintan

6	<i>Yovistra Psychiatric Bed</i>	Bintan
7	<i>Wireless Digital Polysomnograph/PSG</i>	Bintan
8	<i>Medicore Heart Rate Variability Analyzer</i>	Bintan
SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		
9	UPS 250 KVA	Bintan
10	<i>Water Treatmen Plant (WTP)</i>	Bintan
11	Sumur Artesis	Bintan
12	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Bintan
13	<i>Incenerator</i>	Bintan
SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DI FASILITAS LAYANAN KESEHATAN		
14	Bangunan Gedung Kantor (Gedung Negara Tidak Sederhana) Gedung Inap Kesehatan Jiwa Geriatri Pria dan Wanita, Gedung Inap dan Rehabilitasi Komorbiditas, Gedung Inap Kesehatan Jiwa Akut Anak Pria dan Wanita, Gedung Rehabilitasi Psikososial Kesehatan	Bintan
15	Belanja Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Bintan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD